BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS
UNIKOM

2.1 Sejarah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Selama hampir 35 tahun perjalanan Program Keluarga Berencana yang kemudian menjadi Gerakan Keluarga berencana Nasional, telah mengalami pertumbuhan yang sangat dinamis. Dinamika program yang tinggi tersebut merupakan suatu wujud keberhasilan dan penerimaan masyarakat terhadap program yang ditawarkan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, serta sesuai dengan tuntutan otonomi daerah yang menempatkan seluruh program harus bersinggungan dan menyentuh kebutuhan masyarakat, maka desa sebagai wilayah yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Karena kedudukannya yang sangat strategis itulah, desa ditempatkan pada bagian terpenting dari sebuah proses pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di masa mendatang dalam rangka pengembangan sumber daya manusia potensial yang produktif dan kompetitif.

Sejarah BKKBN dapat di bagi menjadi beberapa bagian dari masa ke masa sebagai berikut:

2.1.1. Keluarga Berencana Sebelum Tahun 1970, (Pendekatan perseorangan).

Gagasan Keluarga Berencana di Indonesia sebenarnya sudah diperkenalkan oleh beberapa tokoh masyarakat sejak tahun 1950, tetapi baru pada

tahun 1957 mulai terbentuk suatu organisasi swasta yang memelopori pelaksanaannya bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Pada saat itu, berhubung pemerintah tidak merestui gagasan keluarga berencana, maka pendekatan yang di tempuh bersifat pribadi antara seorang dokter dengan pasiennya, atas dasar pertimbangan kesehatan. Kegiatan ini hanya terbatas pada kalangan berpendidikan atau golongan menengah ke atas pada masyarakat di kota-kota besar. Oleh karena itu, pada era sebelum tahun 1970-an pendekatan keluarga berencana lebih bersifat PERSEORANGAN.

2.2.2. Keluarga Berencana Tahun 1979-1975, (pendekatan klinik).

Pada tahap awal pelaksanaan keluarga berencana di tahun 1970-an sampai dengan tahun 1975-an, arah kebijaksanaan lebih ditekankan kepada perluasan jangkauan. Pada dimensi perluasan jangkauan ini, strategi pelaksanaannya adalah melalaui pendekatan ke wilayah yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera kepada masyarakat secara keseluruhan. Pada tahap ini, keluarga berencana diperkenalkan dengan tujuan dapat diterima oleh seluruh komponen bangsa, baik oleh unsur pemerintah, unsur tokoh masyarakat, maupun oleh masyarakat itu sendiri, Karena sifat pendekatan seperti itulah, maka operasional di klinik lapangan lebih diwarnai dengan gencarnya kampanye KB melalui berbagai pendekatan individual, kelompok dan massa dengan memanfaatkan berbagai media dan forum komunikasi yang ada dalam masyarakat maupun media dan forum komunikasi yang ada dalam masyarakat maupun media dan forum yang diciptakan oleh pemerintah.

Pada tahap ini prakarsa lebih banyak di ambil oleh pemerintah/ petugas. Karena itu, maka Keluarga Berencana Nasional dikenal dengan label PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL. Sasaran langsung operasional yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah mengajak pasangan usia subur sebanyak-banyaknya agar menjadi peserta KB baru. Sedangkan sasaran tidak langsung, adalah ide keluarga berencana dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perkembanganya kemudian, kegiatan yang semakin meluas itu memerlukan fasilitas pelayanan yang lebih luas sehingga pemerintah merasa mendirikan klinik keluarga berencana. Dan mengingat pendekatan yang dilakukan digabung dengan pelayanan kesehatan, dimana seseorang mengikuti program keluarga berencana bertujuan untuk kesehatan dirinya dan keluarganya, maka periode ini Program Keluarga Berencana dilakukan dengan PENDEKATAN KLINIK.

2.2.3. Keluarga Berencana Tahun 1975-1980, (pendekatan KB Integrasi)

Sebagai kelanjutan sebelumnya, sejak akhir tahun 1975-an kebijaksanaan program KB Nasional diarahkan menuju tahapan pelembagaan. Pada dimensi pelembagaan ini, strategi pelaksanaan Program KB Nasional adalah program KB didukung oleh seluruh komponen masyarakat, diterima secara merata diseluruh wilayah, serta dipraktekkan oleh setiap keluarga (Pasangan Usia Subur) sehingga jumlah peserta KB baru dan praktek KB aktif terus meningkat.

Disamping itu pula, disadari dan dirasakan bahwa upaya-upaya yang bersifat terbatas itu perlu dikembangkan dengan meletakan landasan bagi integrasi Program Keluaraga Berencana dengan upaya-upaya di bidang lain. Maka pada

periode ini Program Keluarga Berencana diintegrasikan bidang - bidang koperasi, pemberantasan penyakit cacing, kesehatan ibu dan anak, gizi dan lain-lain Dengan demikian, maka pada periode ini kegiatan dilaksanakan melalui PENDEKATAN INTEGRATIF.

Kuatnya dukungan dari segenap komponen masyarakat terlihat dari semakin meluasnya ide Keluarga Berencana diterima oleh para tokoh formal dan informal disetiap tingkatan, bahkan secara nyata mereka terjun langsung mengkampanyekan tentang pentingnya Keluaga Berencana. Dengan semakin menguatnya dukungan masyarakat tersebut, pada tahap ini mulai dilakukan perintisan model partisipasi masyarakat melalui penyiapan dan pembentukan institusi masyarakat yang secara khusus sebagai pengelola program KB lingkungannya. Maka, dikenallah (di Propinsi Jawa Barat) institusi masyarakat pengelola Program KB di tingkat desa/kelurahan dengan sebutan Pos KB Desa, ditingkat RW disebut Sub Pos KB Desa, dan ditingkat RT disebut kelompok akseptor.

Para institusi masyarakat tersebut, sebagian besar terdiri dari para tokoh masyarakat (terutama ibu-ibu) yang telah melaksanakan atau mempraktekkan, serta merasakan manfaatnya ber-KB dan secara sukarela serta tanpa imbalan mau membantu para PLKB melakukan kegiatan penyuluhan (KIE) dan mendistribusikan obat kontrasepsi PIL, kondom ulangan kepada para peserta KB di lingkungannya masing-masing.

Sejak terbentuknya institusi masyarakt tersebut, para petugas lapangan KB (PLKB) dalam melaksanakan kegiatan operasional di lapangan tidak "berjalan

sendirian" menyusuri lorong-lorong untuk melakukan penyuluhan dan membagi-bagikan PIL KB, tetapi sudah mulai melibatkan atau dibantu para institusi masyarakat tersebut.

Sejalan dengan semakin tingginya frekuensi kegiatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, maka semakin perlu pula penataan system di dalam proses kegiatannya. Karena itu, pada tahap ini kita mengenal dengan MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KB NASIONAL. Penjelasan Mekanisme Operasional Program KB Nasional (yang kemudian menjadi Gerakan KB Nasional) di tingkat desa akan diuraikan dibagian tiga.

2.2.4. Keluarga Berencana Tahun 1980-1990, (pendekatan kemasyarakatan)

Berbekal landasan yang dibangun pada tahapan sebelumnya, pelaksanaan Program KB Nasional pada era 1980-an sampai dengan akhir tahun 1990 yang disebut tahapan pembudayaan, mengalami perkembangan yang cukup menarik terutama pada akhir tahun 1985-an.

Pada periode ini perkembangan pendekatan program Keluaraga Berencana meningkat dengan adanya kesadaran bahwa program ini tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh pihak pemerintah saja, tetapi diperlukan juga peranan dan tanggung jawab masyarakat secara langsung, karena itu, label "PROGRAM" KB Nasional yang beranggapan bahwa KB hanya urusan pemerintah berkembang menjadi label "GERAKAN" KB Nasional, sebagai suatu gerakan masyarakat dengan bantuan teknis pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut di era ini mulai diperkenalkan KB mandiri mulai KB mandiri partial dan KB mandiri penuh dengan pelayanan dokter dan bidan praktek swasta.

Konsep gerakan KB nasional bersama masyarakat pada dasarnya merupakan gerakan kemandirian dari masyarakat dalam sikap dan perilaku pelaksanaan praktek keluarga berencana, sehingga KB merupakan suatu kebutuhan. Kerena itu, pada periode ini keluarga berencana dilaksanakan dangan PENDEKATAN KEMASYARAKATAN.

2.2.5. Keluarga Berencana Tahun 1990 - 1999, (KB sebagai cara hidup dalam rangka keluarga sejahtera).

Pada era 1990-an, satu hal yang perlu dicermati adalah semakin berkembangnya muatan Gerakan KB Nasional sebagai konsekwensi dari upaya mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan sejahtera, yaitu dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera.

Keluarga berencana dilaksanakan bukan hanya sebatas urusan kontrasepsi namun mencakup aspek yang lebih luas, sehingga **Gerakan KB Nasional** menurut pasal 1 ayat 12 dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan peningkatan Kesejahteraan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera.

Dengan demikian, konsep keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera harus dapat di bangun secara utuh dan tidak terpisahkan satu sama lain sebagai mana diisyaratkan pada pasal 1 ayat 16 UU nomor 10 tahun 1992, yaitu bahwa "Norma Keluarga Kecil Bahagia dan sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga dan

masyarakat, yang berorientasi pada kehidupan sejahtera denagan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Seiring dengan perkembangan Gerakan KB Nasional sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 12 dan 16 tersebut, arah dari Gerakan KB lebih difokuskan kepada upaya pemberdayaan keluarga yang bertujuan agar setiap keluarga diberi kesempatan untuk:

- tahu masalah yang sedang terjadi pada diri dan keluarganya,
- punya kemauan untuk menyelasesaikan masalah yang dihadapinya, serta
- berusaha untuk mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri.

Adapun program pemberdayaan yang telah dan sedang dilaksanakan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendewasaan Usia Perkawinan, yaitu suatu upaya agar setiap keluarga memahami dan menyadari bahwa lembaga keluarga harus terbentuk dan tercipta dari pasangan suami istri yang betul-betul matang dan siap secara biologis, psikologis, ekonomis, sosial serta mental spiritual. Program yang dilaksanakan meliputi antara lain:
   - Perluasan perolehan kesempatan kerja.
   - Kesempatan memperoleh pendidikan
   - Pendidikan reproduksi sehat bagi remaja
2. Pengaturan Kelahiran, yaitu suatu upaya agar setiap keluarga memahami dan menyadari tentang prinsip keterbatasan sebagai manusia. Seorang istri akan menghadapi kesulitan manakala masa kesuburan tidak dikelola secara

bijaksana dan teratur. Seorang ibu yang telalu sering, terlalu banyak, terlalu dekat dalam mengatur kehamilannya akan sangat mengganggu terhadap berbagai sisi kehidupan dirinya dan seluruh anggota keluarga, lainnya, misalnya masalah kesahatan, kehidupan sosial, ekonomi, serta pendidikan, program pengaturan kelahiran yang dilaksanakan meliputi antara lain:

- Pendidikan reproduksi sehat bagi Keluarga.
- Peningkatan cakupan peserta KB Metoda jangka panjang
- Peningkatan cakupan peserta KB Mandiri

3. Pembinaan Kesehatan Keluarga, yaitu suatu upaya agar setiap keluarga secara dinamis memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemandirian untuk mengembangkan diri dan keluarganya sebagai sumber daya manusia potensial yang efektif dan produktif. Program penigkatan ketahanan keluarga yang dilaksanakan meliputi antara lain:

- Bina Keluarga Balita (BKB)
- Bina Keluarga Remaja (BKR)
- Bina Keluarga Lansia (BKL)

4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, yaitu suatu upaya agar setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup, terutama dapat tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga. Program yang dilaksanakan meliputi program pengentasan kemiskinan dengan pola sebagai berikut:

- Pola pemberdayaan, yaitu upaya yang dilakukan agar keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I yang belum usaha agar tahu, mau dan mampu melakukan usaha. Dalam

proses pembelajaran ini, dukungan yang diberikan adalah Kredit Keluarga Sejahtera (KUSESRA) maupun dukungan modal lelang kepedulian.

- Pola Peningkatan, yaitu upaya yang dilakukan agar keluarga sejahtera dan keluarga prasejahtera I (serta keluarga sejahtera II, III, III plus) yang tergabung dalam kelompok usaha dan akan meningkatkan kegiatan usahanya. Dalam kaitan itu, dukungan yang diberikan adalah kredit pengembangan kemitraan usaha (KPKU), kredit pengembangan teknologi tepat guna (KPTTG), maupun skim kredit lainnya.

Sejalan dengan praktek pelaksanaan KB sebagai cara hidup keluarga dalam rangka membangun keluarga sejahtera, pada periode ini propinsi Jawa Barat di tandai pula tumbuhya institusi masyarakat sebagai pengambangan dari kelompok akseptor menjadi paguyuban keluarga sejahtera "SARTIKA" di tingkat RT.

2.2.6. Keluarga Berencana Tahun 2000-an, (Penyiapan SDM potensial pendukung NKKBS).

Kebijaksanaan Gerakan KB Nasional pada tahun 2000-an merupakan kelanjutan dan pengembangan kebijaksanaan dan program periode sebelumnya. Keberhasilan dari segi kuantitas yang tergambarkan dalam penurunan angka kelahiran perlu terus dilanjutkan dan diimbangi dengan percepatan peningkatan kualitas keluarga.

Percepatan peningkatan kualias keluarga semakin dirasakan urgensinya seiring dengan:

1. Persaingan Global dalam milenium ketiga - abad XXI yang sebentar lagi akan kita masuki,
2. Perubahan komposisi dan struktur penduduk yang berlangsung makin cepat sebagai akibat dan keberhasilan dalam aspek kualitas.

Dengan demikian, arah dan pendekatan pembangunan keluarga perlu dikembangkan dari pendekatan yang lebih kualitatif, agar keluarga menjadi SUMBER DAYA MANUSIA POTENSIAL YANG KOMPETITIF DAN PRODUKTIF.

2.2 Bentuk dan Badan Hukum BKKBN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten/ Kota yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BKKBN Kabupaten/ Kota, adalah instansi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten/ Kota. BKKBN Kabupaten/ Kota dipimpin oleh seorang Kepala BKKBN Kabupaten/ Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN Propinsi dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Bupati/ Walikota.

2.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan BKKBN

BKKBN Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di

Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, BKKBN Kabupaten/ Kota menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN Kabupaten/ Kota ;
b. pelancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/ Kota;
c. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatusahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, BKKBN Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

2.4 Visi Dan Misi BKKBN

Visi Gerakan KB Nasional Dalam Pengembangan SDM Potensial Adalah Pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) pada tahun 2020 dalam rangka melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Pembangunan berwawasan penduduk dan keluarga adalah pembangunan yang dilaksanakan secara seksama mempertimbangkan bahwa penduduk dan

keluarga ditempatkan sebagai sasaran dan pelaku, serta sekaligus dapat digunakan sebagai wahana pengembangan potensi dasar seseorang.

Sedangkan kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah dimana keadaan tercapainya keseimbangan antara jumlah Ibu dengan jumlah Calon Ibu (anak perempuan) yang dilahirkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka kondisi Net Reproduction Rate (NRR) = 1 yaitu kondisi dimana dari rata - rata 1000 ibu hanya dilahirkan 1000 calon ibu (anak perempuan). Selanjutnya untuk mencapai NRR = 1, maka harus dicapai angka TFR = 2,1 yaitu kondisi dimana dari setiap 1000 ibu hanya dilahirkan 2100 anak.

Berdasarkan konsep, ciri - ciri visi tersebut, maka misi dari Gerakan KB Nasional dalam rangka pengembangan SDM potensial adalah Pemberdayaan Keluarga melalui peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahtraan keluarga.

2.5 Struktur Organisasi BKKBN

Struktur Organisasi merupakan kerangka dasar dalam manajemen sebuah Instansi dimana dengan mempelajari struktur organisasi, suatu instansi akan dengan mudah pula mempelajari kehidupan instansi, baik jenjang otoritas, wewenang, maupun tanggung jawab antara karyawan. Masing-masing struktur organisasi ini menggambarkan hbungan yang ada dalam suatu organisasi atau instansi.

Struktur organisasi BKKBN Propinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi yang berbentuk stat dan garis, hal ini terlihat dengan adanya pembagian divisi atau pembagian tugas antara satu bidang dengan bidang lainnya.

Dalam hal ini penulis hanya akan membahas urutan tugas yang ada dibagian IKAP, secara garis besar, susunannya adalah sebagai berikut :

1. Kepala

   Adapun tugas dari seorang kepala adalah sebagai berikut :

   a. memimpin BKKBN Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yng berlaku;
   b. menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas BKKBN Kabupaten/ Kota;
   c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN Kabupaten/ Kota yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
   d. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di Kabupaten/ Kota.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumberdaya di lingkungan BKKBN kabupaten/ kota.

   Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan.

b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana.

c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan perbekalan.

Sekretariat terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

c. Subbagian Perlengkapan dan Perbekalan.

Adapun tugas dari Subbagian-subbagian tersebut adalah :

(1.) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri serta pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukaan, administrasi pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

(2.) Subbagian tatausaha dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program serta penelaahan hukum, perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan.

(3.) Subbagian perlengkapan dan perbekalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan

perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan

2.6 Struktur Organisasi Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program

Bidang informasi keluarga dan analisis program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan pelaksanaan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/ Kota.

Dalam melakukan tugas sebagaimana yang dimaksud, bidang informasi keluarga dan analisa program menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi dibidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera.
c. Pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan statistik di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program terdiri dari:

a. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

   Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan pengolahan teknologi informasi serta melakukan pelayanan telematika dan dokumentasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/ Kota.

b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program

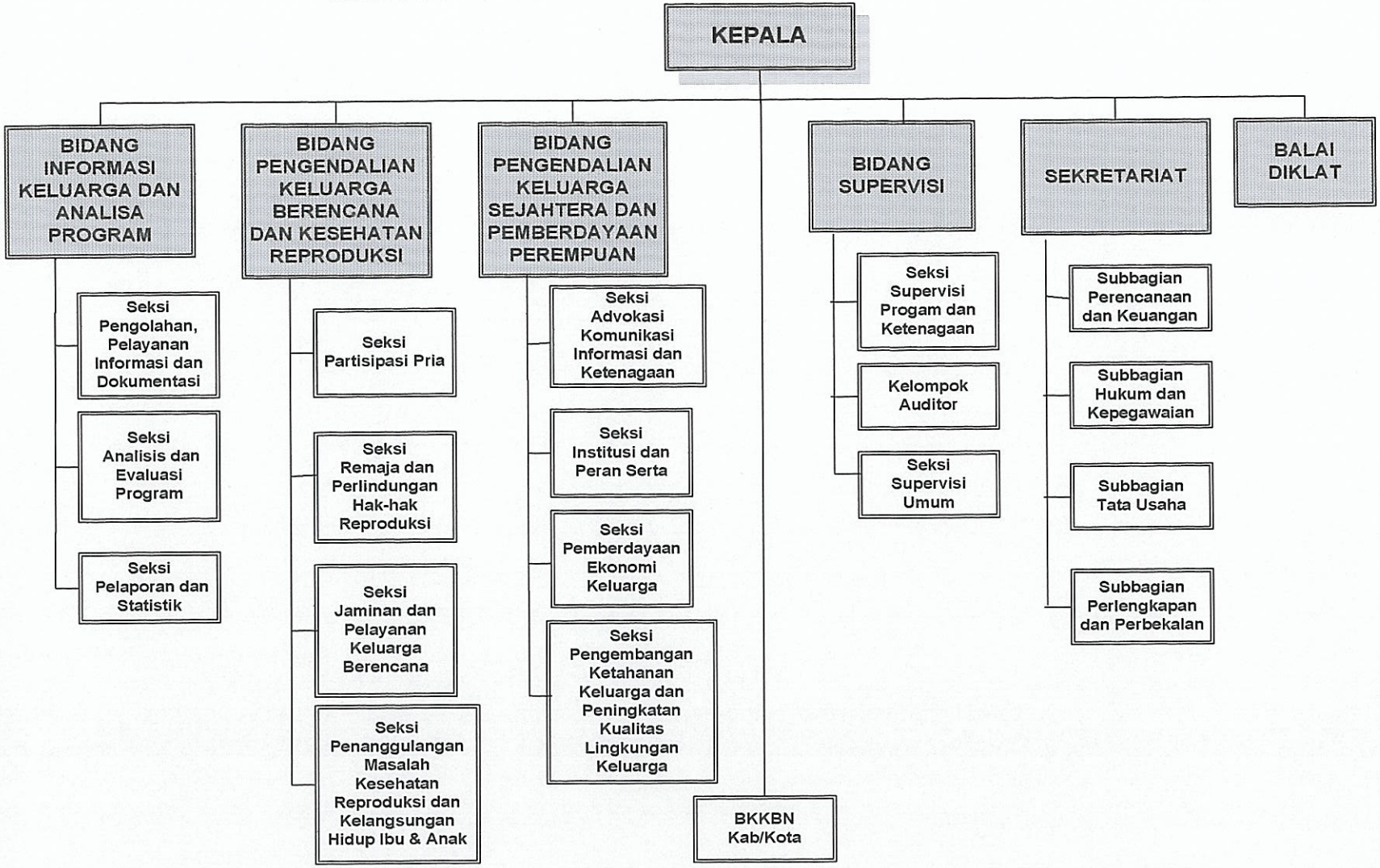
Seksi Analisis dan Evaluasi program mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dari pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/ Kota

c. Seksi Pelaporan dan Statistik

Seksi Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/ Kota

Adapun Struktur Organisasi selengkapnya bisa dilihat pada halaman berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BKKBN PROPINSI JAWA BARAT



STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG INFORMASI KELUARGA DAN ANALISA PROGRAM
BKKBN PROPINSI JAWA BARAT

